

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Perundang-undangan :

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

### II. Jurnal

Kadarsih, S. (2010). *Tugas dan wewenang ombudsman republik indonesia dalam pelayanan publik menurut uu no.37 tahun 2008*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No.2,1-2.

### III. Buku

Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT.Alumni.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (1997). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.

Lukman, Mediya. (2012). *Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kaligis, OC. (2005). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT.Alumni.

Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT.Refika Aditama.